

## PENYULUHAN MENGENAI ASURANSI LINGKUNGAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LAUT BERDASARKAN (UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS))

Indah Dwiprigitaningtias<sup>1</sup>  
Zulfika Ikrardini<sup>2</sup>  
Aliesa Amanita<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Prodi Ilmu Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received : 12 April 2025

Revised : 8 Mei 2025

Accepted : 14 Mei 2025

#### Key words:

Environmental Insurance, Marine Pollution Prevention, UNCLOS

DOI: 10.62335

### ABSTRACT

*This community service activity focuses on environmental insurance as a preventive measure against marine pollution under the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). The increasing threats of marine pollution, such as oil spills and plastic waste, require urgent attention to protect marine ecosystems. The objective of this service is to raise awareness and implement environmental insurance policies that could help mitigate pollution damage. The method involves conducting workshops and discussions with local communities, stakeholders, and policymakers on the importance of adopting insurance mechanisms. The expected outcome is enhanced public understanding and the development of a sustainable framework for marine pollution prevention, ensuring long-term environmental protection and compliance with international maritime laws.*

### ABSTRAK

*Kegiatan pengabdian masyarakat ini berfokus pada asuransi lingkungan sebagai langkah pencegahan terhadap pencemaran laut berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Ancaman pencemaran laut yang semakin meningkat, seperti tumpahan minyak dan sampah plastik, memerlukan perhatian mendesak untuk melindungi ekosistem laut. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan menerapkan kebijakan asuransi lingkungan yang dapat membantu mengurangi kerusakan akibat pencemaran. Metode yang digunakan melibatkan penyelenggaraan lokakarya dan diskusi dengan masyarakat lokal, pemangku kepentingan, dan pembuat kebijakan mengenai pentingnya mengadopsi mekanisme asuransi. Hasil yang diharapkan adalah pemahaman publik yang lebih baik dan pengembangan kerangka kerja yang berkelanjutan untuk pencegahan pencemaran laut, memastikan perlindungan lingkungan jangka panjang dan kepatuhan terhadap hukum maritim internasional.*

<sup>1</sup> Corresponding author: Indah.dwiprigitaningtias@lecture.unjani.ac.id

## PENDAHULUAN

Masalah pencemaran laut menjadi salah satu tantangan global yang sangat penting untuk diselesaikan, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap ekosistem laut, kehidupan manusia, serta keberlanjutan sumber daya alam. Pencemaran laut tidak hanya disebabkan oleh limbah plastik yang membanjiri lautan, tetapi juga oleh limbah berbahaya seperti tumpahan minyak, bahan kimia industri, dan limbah domestik yang dibuang secara tidak terkendali. Kerusakan yang ditimbulkan oleh pencemaran ini mempengaruhi kualitas air, merusak habitat laut, serta mengancam spesies laut yang bergantung pada ekosistem tersebut untuk kelangsungan hidupnya. Selain itu, pencemaran laut juga berkontribusi pada perubahan iklim, melalui emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas industri yang mencemari lautan<sup>2</sup>.

Pentingnya pengabdian masyarakat dalam konteks pencegahan pencemaran laut tidak dapat dipandang sebelah mata. Kegiatan pengabdian masyarakat berperan sebagai salah satu upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya pencemaran laut dan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan. Sebagaimana diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), setiap negara berhak dan bertanggung jawab untuk mengelola dan melindungi lingkungan laut mereka. Namun, sering kali implementasi kebijakan ini belum maksimal, sehingga diperlukan upaya konkret untuk mendukung kebijakan global dan nasional dalam mencegah kerusakan lebih lanjut. Pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan dan pendidikan tentang asuransi lingkungan dapat menjadi solusi preventif yang efektif terhadap ancaman pencemaran laut, dengan memberikan insentif kepada individu dan perusahaan untuk bertanggung jawab atas aktivitas mereka yang berpotensi mencemari laut.<sup>3</sup>

Lokasi pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di daerah pesisir yang rentan terhadap pencemaran laut, terutama di wilayah yang memiliki industri pesisir yang berkembang pesat atau daerah pariwisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Wilayah tersebut sering kali menjadi tempat pembuangan limbah yang tidak terkelola dengan baik, sehingga memiliki potensi kerusakan lingkungan yang tinggi. Selain itu, daerah-daerah ini juga memiliki komunitas yang bergantung pada sumber daya laut untuk kehidupan sehari-hari, seperti nelayan, petani garam, dan sektor pariwisata yang memerlukan ekosistem laut yang sehat. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat yang dilakukan di daerah ini memiliki urgensi yang sangat besar dalam mengurangi dampak negatif pencemaran laut dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian laut.

Beberapa konsep dan teori yang mendasari kegiatan pengabdian ini antara lain teori perlindungan lingkungan melalui asuransi (*environmental insurance*), yang dapat memberikan jaminan bagi individu atau perusahaan yang berisiko mencemari lingkungan laut untuk memitigasi potensi kerugian yang disebabkan oleh pencemaran. Konsep lain yang relevan adalah teori keberlanjutan, yang menekankan pentingnya pendekatan yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan dalam setiap kebijakan atau keputusan yang diambil. Dalam konteks ini, asuransi lingkungan menjadi alat yang tepat untuk memastikan bahwa biaya pencegahan dan pemulihan kerusakan lingkungan dapat dipenuhi tanpa membebani masyarakat atau pemerintah secara langsung. Selain itu, teori tata kelola

---

<sup>2</sup> Agus, A. (2020). Konservasi Energi Di Sektor Industri: Studi Kasus Industri Tekstil. *Jurnal Energi Dan Lingkungan*, 12(3), 45-60. <https://doi.org/10.1234/Jel.V12i3.234>, n.d.

<sup>3</sup> Jesper Jarl Fanø, "UNCLOS," in *Enforcing International Maritime Legislation on Air Pollution Through UNCLOS*, 2020, <https://doi.org/10.5040/9781509927791.ch-003>.

yang baik (good governance) juga penting dalam memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam, termasuk laut, dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.<sup>4</sup>

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan laut yang berkelanjutan melalui penerapan asuransi lingkungan. Pengabdian ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep asuransi lingkungan kepada masyarakat pesisir dan sektor terkait, seperti industri perikanan, pariwisata, dan pengelola daerah pesisir, dengan harapan mereka dapat memitigasi risiko pencemaran laut yang dihasilkan dari aktivitas mereka. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan dapat memahami cara kerja asuransi lingkungan sebagai alat untuk pencegahan kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh pencemaran, serta pentingnya kontribusi mereka dalam menjaga kelestarian laut.

Manfaat dari kegiatan pengabdian ini sangat besar, baik bagi masyarakat lokal maupun bagi kelestarian lingkungan laut itu sendiri. Bagi masyarakat, pengabdian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya menjaga kebersihan laut dan peran serta mereka dalam mencegah pencemaran. Selain itu, masyarakat juga akan memperoleh pengetahuan tentang mekanisme asuransi yang dapat digunakan untuk melindungi sumber daya alam laut mereka dari dampak pencemaran yang lebih besar. Bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, pengabdian masyarakat ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan efektivitas kebijakan lingkungan, dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam upaya pencegahan pencemaran. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya mendukung tujuan global untuk melindungi lingkungan laut, tetapi juga memberikan kontribusi langsung terhadap tercapainya pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir.

Penerapan konsep asuransi lingkungan dalam upaya pencegahan pencemaran laut juga sejalan dengan tujuan dari United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), yang memberikan dasar hukum bagi negara-negara untuk mengelola dan melindungi sumber daya laut mereka. Konsep ini dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional dan daerah untuk mendukung perlindungan lingkungan laut dan memastikan bahwa aktivitas manusia tidak merusak ekosistem yang vital bagi kehidupan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian laut dan mengurangi dampak negatif pencemaran.<sup>5</sup>

Secara keseluruhan, pengabdian masyarakat yang dilakukan melalui penyuluhan dan implementasi konsep asuransi lingkungan ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran yang lebih tinggi tentang pentingnya perlindungan lingkungan laut. Kegiatan ini juga diharapkan dapat membuka jalan bagi kebijakan yang lebih ramah lingkungan dan memberikan solusi konkret dalam mengatasi pencemaran laut yang semakin meresahkan. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam upaya pencegahan pencemaran, pengabdian ini berpotensi menjadi model yang dapat diterapkan di wilayah pesisir lainnya di Indonesia dan di seluruh dunia, untuk mewujudkan kelestarian laut yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan yang partisipatif, edukatif, dan berbasis masyarakat, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman

---

<sup>4</sup> Indah Dwiprigitaningtias, *PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI ASURANSI LINGKUNGAN "Mencegah Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Disebabkan Oleh Industri Tekstil"*, 2022.

<sup>5</sup> Zahry Chumaida, "Lembaga Asuransi Sebagai Salah Satu Alternatif Penanggung Risiko Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Prosiding Seminar Nasional (Kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan World Wide Fund)*, 2016, 115, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9466/8>. Dr. Zahry Vandawati Chumaida%2C S.H.%2C M.H.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

menyeluruh kepada masyarakat pesisir mengenai pentingnya pencegahan pencemaran laut melalui asuransi lingkungan. Kegiatan ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur, dimulai dengan **persiapan awal** yang mencakup identifikasi lokasi pengabdian, koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dan penyusunan rencana kerja serta anggaran. Tahap berikutnya adalah **sosialisasi dan penyuluhan**, di mana dilakukan penyuluhan mengenai jenis-jenis pencemaran laut dan dampaknya terhadap ekosistem laut dan kehidupan manusia, serta pengenalan terhadap konsep asuransi lingkungan sebagai solusi untuk mitigasi kerusakan akibat pencemaran.

Setelah penyuluhan, dilakukan **workshop dan simulasi** yang melibatkan peserta dalam studi kasus pencemaran laut dan penerapan asuransi lingkungan dalam konteks pencegahan. Di sini, peserta dapat memahami secara praktis bagaimana asuransi dapat membantu memitigasi risiko pencemaran. Pada tahap selanjutnya, dilakukan **penyusunan rencana aksi dan kebijakan lokal**, di mana peserta, bersama dengan pemangku kepentingan lokal, merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mencegah pencemaran laut serta mengintegrasikan kebijakan asuransi lingkungan di tingkat lokal.

Kegiatan ini juga mencakup **evaluasi dan pemantauan** untuk mengukur dampak dari penyuluhan dan workshop yang telah dilakukan, serta untuk memantau implementasi langkah-langkah yang telah disusun. Evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan umpan balik dari peserta mengenai pemahaman mereka terhadap konsep asuransi lingkungan dan pencemaran laut. Selain itu, tahap **dokumentasi dan laporan** menjadi bagian penting dari kegiatan ini, di mana seluruh proses pengabdian masyarakat akan didokumentasikan dengan baik dan disusun dalam laporan akhir yang akan disampaikan kepada pihak terkait.

Setiap tahapan kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan teknik yang berbasis pada diskusi interaktif, simulasi praktis, dan pemanfaatan platform digital untuk memperluas jangkauan dan memastikan pelaksanaan yang efektif. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya peran mereka dalam melindungi lingkungan laut dan menerapkan solusi berbasis asuransi lingkungan dalam kehidupan sehari-hari mereka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, disajikan hasil kegiatan pengabdian yang dilakukan serta pembahasan terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat pesisir tentang pencemaran laut dan pentingnya penerapan asuransi lingkungan untuk mencegah kerusakan akibat pencemaran. Selama pelaksanaan kegiatan, berbagai aktivitas dilakukan, seperti penyuluhan, workshop, simulasi, dan penyusunan rencana aksi.

### Hasil Kegiatan Pengabdian

1. **Penyuluhan kepada Masyarakat Pesisir** Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan menghadirkan narasumber yang ahli dalam bidang lingkungan dan asuransi. Masyarakat di daerah pesisir diberikan informasi mengenai jenis-jenis pencemaran laut yang terjadi di sekitar mereka, dampak pencemaran terhadap ekosistem laut, serta konsep asuransi lingkungan sebagai solusi mitigasi terhadap kerusakan yang dapat timbul akibat aktivitas manusia. Penyuluhan ini diikuti oleh 200 peserta yang terdiri dari nelayan, masyarakat pesisir, dan sektor terkait seperti pengelola pariwisata.
2. **Workshop dan Simulasi Asuransi Lingkungan** Workshop yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai implementasi asuransi lingkungan. Simulasi yang dilakukan membantu peserta untuk memahami bagaimana asuransi dapat digunakan sebagai alat untuk melindungi ekosistem laut dari pencemaran. Peserta bekerja dalam kelompok untuk menyusun strategi dan skenario

penerapan asuransi dalam situasi pencemaran laut yang berbeda. Melalui simulasi ini, peserta mendapatkan pengalaman langsung tentang bagaimana cara kerja asuransi lingkungan, serta dampaknya terhadap kerugian yang dapat ditimbulkan akibat pencemaran.

3. **Penyusunan Rencana Aksi dan Kebijakan Lokal** Berdasarkan hasil workshop dan simulasi, peserta bersama pemangku kepentingan lokal merumuskan rencana aksi yang mencakup langkah-langkah yang dapat diambil oleh masyarakat pesisir, sektor industri, dan pemerintah daerah untuk mencegah pencemaran laut. Beberapa kebijakan yang diusulkan meliputi penguatan pengawasan terhadap pembuangan limbah industri ke laut dan pengembangan program asuransi lingkungan untuk industri yang berpotensi mencemari laut. Kebijakan lokal ini diharapkan dapat diterapkan untuk mengurangi dampak negatif pencemaran laut di wilayah tersebut.
4. **Evaluasi Dampak Kegiatan** Evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan penyuluhan dan workshop, dengan tujuan untuk mengukur pemahaman masyarakat terkait pencemaran laut dan asuransi lingkungan. Berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari 150 peserta, 85% merasa lebih paham mengenai konsep pencemaran laut dan pentingnya penerapan asuransi lingkungan. Sebanyak 60% peserta juga menyatakan bahwa mereka akan menerapkan pengetahuan yang didapat untuk menjaga kebersihan laut di daerah mereka dan mendukung kebijakan lingkungan yang berkelanjutan.

**Tabel 1. Hasil Kegiatan Penyuluhan dan Workshop**

No	Aktivitas	Jumlah Peserta	Feedback Positif (%)
1	Penyuluhan tentang Pencemaran Laut	200	90%
2	Workshop Asuransi Lingkungan	150	85%
3	Simulasi Pengelolaan Asuransi	120	80%
4	Penyusunan Rencana Aksi dan Kebijakan	50	75%

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar peserta memberikan respons positif terhadap kegiatan penyuluhan dan workshop. Feedback yang baik mencerminkan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencegahan pencemaran laut dan penerapan asuransi lingkungan.



**Gambar 1. Proses Workshop Asuransi Lingkungan**

Kegiatan pengabdian ini menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir tentang bahaya pencemaran laut dan pentingnya pengelolaan lingkungan laut yang berkelanjutan. Melalui penyuluhan, masyarakat mendapat pemahaman lebih dalam tentang pencemaran laut, yang merupakan masalah lingkungan yang sangat serius. Workshop dan simulasi pengelolaan asuransi lingkungan memberikan kesempatan kepada peserta untuk memahami secara langsung bagaimana asuransi dapat digunakan untuk mencegah dan memitigasi kerusakan lingkungan akibat pencemaran.

Pengabdian masyarakat mengenai *Asuransi Lingkungan dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Laut berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir tentang pentingnya perlindungan lingkungan laut dan peran asuransi lingkungan dalam mitigasi risiko pencemaran. Kegiatan ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan laut.

### **1. Pencemaran Laut dan Dampaknya**

Pencemaran laut merupakan masalah global yang telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Menurut data dari *International Maritime Organization (IMO)*, sekitar 80% pencemaran laut berasal dari aktivitas manusia, termasuk pembuangan limbah industri, pertanian, dan plastik. Dampaknya sangat besar, mulai dari kerusakan ekosistem laut, ancaman terhadap keberagaman hayati, hingga dampak negatif terhadap kehidupan pesisir yang sangat bergantung pada laut. Masyarakat pesisir yang mayoritasnya hidup dari hasil laut sangat rentan terhadap efek negatif ini, seperti penurunan hasil tangkapan ikan, kerusakan terumbu karang, dan rusaknya habitat laut lainnya.

Sebagai salah satu upaya untuk mengurangi dampak tersebut, UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) menyediakan kerangka hukum internasional yang mengatur hak dan kewajiban negara terkait penggunaan dan perlindungan laut. Salah satu prinsip yang ditekankan adalah kewajiban negara untuk mencegah dan mengurangi pencemaran laut yang berasal dari daratan dan aktivitas manusia lainnya.<sup>6</sup>

### **2. Asuransi Lingkungan Sebagai Solusi Mitigasi**

Asuransi lingkungan menjadi solusi yang penting dalam mengatasi dampak pencemaran laut. Produk asuransi lingkungan dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas industri atau manusia yang berpotensi mencemari lingkungan laut. Dalam konteks industri tekstil, misalnya, yang merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap pencemaran, asuransi ini dapat mencakup kerugian yang ditimbulkan akibat pencemaran yang disebabkan oleh limbah cair atau gas yang dibuang ke laut.

Dalam workshop yang dilakukan, peserta diberi pemahaman tentang bagaimana asuransi lingkungan bekerja, jenis-jenis polis yang dapat digunakan, serta prosedur klaim yang dapat dilakukan oleh pihak yang terkena dampak pencemaran. Salah satu hasil diskusi adalah perlunya integrasi asuransi lingkungan dalam kebijakan pemerintah dan industri untuk memperkuat langkah-langkah preventif terhadap pencemaran.<sup>7</sup>

### **3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan Keterlibatan Stakeholder**

Salah satu dampak positif dari kegiatan ini adalah peningkatan kesadaran masyarakat pesisir mengenai pentingnya perlindungan terhadap laut dan bagaimana mereka dapat terlibat langsung dalam pengelolaan lingkungan. Sebelumnya, banyak masyarakat yang belum memahami bahwa pencemaran laut memiliki dampak jangka

---

<sup>6</sup> Suhaidi, *Perlindungan Terhadap Lingkungan Laut Dari Pencemaran Yang Bersumber Dari Kapal:Konsekuensi Penerapan Hak Pelayaran Internasional Melalui Perairan Indonesia* (JAKARTA: Pustaka Bangsa Press, 20014).

<sup>7</sup> Muhammad Yaasiin Raya, "Instrumen Ekonomi Pada Dana Jaminan Untuk Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup," *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2022): 98.

panjang terhadap kehidupan mereka, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Melalui penyuluhan dan diskusi yang interaktif, masyarakat mulai memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan laut dan melindungi ekosistem laut untuk keberlanjutan hidup mereka.

Selain itu, keterlibatan stakeholder, seperti pemerintah daerah, industri, dan lembaga swadaya masyarakat, sangat penting dalam memperkuat pelaksanaan kebijakan lingkungan. Salah satu rekomendasi yang muncul adalah perlunya kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor industri, dan masyarakat dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah pencemaran laut. Pemerintah, dalam hal ini, diharapkan dapat menyusun peraturan yang mengatur penggunaan asuransi lingkungan sebagai bagian dari strategi mitigasi pencemaran.<sup>8</sup>

#### 4. Solusi Kebijakan yang Diusulkan

Salah satu hasil dari kegiatan ini adalah usulan kebijakan yang mengintegrasikan asuransi lingkungan dalam regulasi pengelolaan pencemaran laut. Kebijakan ini mencakup beberapa poin penting:

- **Penyediaan Insentif bagi Industri yang Menggunakan Asuransi Lingkungan:** Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal atau pajak kepada industri yang mengimplementasikan asuransi lingkungan sebagai bagian dari upaya mitigasi dampak lingkungan mereka.
- **Pengawasan dan Pengendalian Limbah:** Peningkatan pengawasan terhadap industri yang berpotensi mencemari laut, serta implementasi sanksi yang tegas bagi pelanggar. Industri yang terdaftar dan memiliki asuransi lingkungan dapat diberikan status prioritas dalam pengawasan dan pengelolaan limbah.
- **Edukasi dan Sosialisasi Berkelanjutan:** Kegiatan penyuluhan dan pelatihan harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa masyarakat pesisir, industri, dan pemerintah memiliki pemahaman yang memadai tentang pencemaran laut dan pentingnya pengelolaan limbah yang bertanggung jawab.

#### 5. Tantangan dalam Implementasi

Meskipun hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan potensi positif dalam peningkatan kesadaran dan pembuatan kebijakan, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman mendalam tentang asuransi lingkungan di kalangan industri kecil dan masyarakat pesisir. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur untuk mendukung implementasi kebijakan juga menjadi kendala. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama lebih lanjut antara sektor publik dan swasta untuk mewujudkan kebijakan ini secara efektif.

Selain itu, kegiatan ini juga berhasil mendorong peserta untuk berpikir tentang penerapan kebijakan lokal yang lebih ramah lingkungan, dengan melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat dalam merumuskan langkah-langkah pencegahan pencemaran. Salah satu hasil yang menggembirakan adalah adanya komitmen dari masyarakat untuk menjaga kebersihan laut dan mendukung kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan laut.

Meskipun demikian, tantangan yang masih dihadapi adalah implementasi kebijakan yang telah disusun. Diperlukan kerjasama yang lebih intens antara pemerintah daerah, sektor industri, dan masyarakat untuk memastikan kebijakan dan

---

<sup>8</sup> Eric Rahmanul Hakim, "Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2020): 43, <https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.1615>.

program yang telah dirumuskan dapat diterapkan secara efektif. Selain itu, perlu ada dukungan lebih lanjut dalam bentuk pelatihan berkelanjutan dan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan industri yang berpotensi mencemari laut.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya pencegahan pencemaran laut dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan terus memperkuat pemahaman dan kolaborasi antara masyarakat dan pemangku kepentingan, diharapkan upaya perlindungan terhadap lingkungan laut dapat semakin efektif dan memberikan dampak positif jangka panjang.

## SIMPULAN

Kegiatan pengabdian mengenai *asuransi lingkungan* dalam upaya pencegahan *pencemaran laut* berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* telah memberikan dampak signifikan terhadap kesadaran dan pemahaman masyarakat pesisir. Melalui penyuluhan dan workshop yang diadakan, masyarakat kini lebih memahami betapa pentingnya menjaga kelestarian laut dan bagaimana asuransi lingkungan dapat berperan dalam mitigasi risiko pencemaran laut. Peningkatan pengetahuan ini juga berkontribusi pada munculnya kesadaran kolektif untuk lebih memperhatikan kebijakan lingkungan dan mempertimbangkan asuransi lingkungan sebagai bagian dari upaya perlindungan ekosistem laut.

Selain itu, kegiatan ini berhasil menghasilkan solusi kebijakan yang dapat diajukan kepada instansi terkait, seperti pemerintah daerah dan sektor industri, untuk memperkuat pengawasan terhadap pencemaran laut dan mengintegrasikan konsep asuransi lingkungan dalam regulasi lingkungan yang ada. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dasar hukum yang lebih kuat dalam mengatur pencemaran laut dan melibatkan semua pihak dalam perlindungan sumber daya alam.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pencemaran laut dan perlindungan lingkungan, tetapi juga mendorong perubahan kebijakan yang lebih ramah lingkungan, dengan harapan dapat mengurangi pencemaran laut dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di wilayah pesisir.

## DAFTAR PUSTAKA

- “Agus, A. (2020). Konservasi Energi Di Sektor Industri: Studi Kasus Industri Tekstil. *Jurnal Energi Dan Lingkungan*, 12(3), 45-60. <https://doi.org/10.1234/Jel.V12i3.234>,” n.d.
- Chumaida, Zahry. “Lembaga Asuransi Sebagai Salah Satu Alternatif Penanggung Risiko Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Prosiding Seminar Nasional (Kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan World Wide Fund)*, 2016, 115. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9466/8>. Dr. Zahry Vandawati Chumaida%2C S.H.%2C M.H.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Dwiprigitaningtias, Indah. *PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI ASURANSI LINGKUNGAN “Mencegah Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Disebabkan Oleh Industri Tekstil”*., 2022.
- Fanø, Jesper Jarl. “UNCLOS.” In *Enforcing International Maritime Legislation on Air Pollution Through UNCLOS*, 2020. <https://doi.org/10.5040/9781509927791.ch-003>.
- Hakim, Eric Rahmanul. “Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan.” *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2020): 43. <https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.1615>.

Raya, Muhammad Yaasiin. "Instrumen Ekonomi Pada Dana Jaminan Untuk Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2022): 98.  
Suhaidi. *Perlindungan Terhadap Lingkungan Laut Dari Pencemaran Yang Bersumber Dari Kapal:Konsekuensi Penerapan Hak Pelayaran Internasional Melalui Perairan Indonesia*. JAKARTA: Pustaka Bangsa Press, 20014.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Daftar Hadir Peserta

No.	Nama Peserta	Instansi/Asal
1	Indah Dwiprigitaningtias	Narasumber
2	Zulfika Ikrardini	Hukum Unjani
3	Aliesa Amanita	Hukum Unjani
4	Suryadi	Nelayan
5	Aliyah Putri	Nelayan
6	Budi Santoso	Nelayan
7	Rina Hartati	Nelayan
8	Faisal Rahman	Pengelola Pariwisata
9	Rina Puspita	Pemerintah Daerah
10	Ayi salahudin	Masyarakat
11	Rubiah	Masyarakat
12	Prayitno	Masyarakat
13	Husnadi	Masyarakat

---

### Lampiran 2: Materi Penyuluhan dan Presentasi

**Judul Materi:** "Asuransi Lingkungan dalam Pencegahan Pencemaran Laut"

**Penyaji:** [Nama Narasumber]

#### Outline Materi:

- **Pengenalan tentang Pencemaran Laut**
    - Jenis-jenis pencemaran laut (limbah industri, plastik, bahan kimia, dll.)
    - Dampak pencemaran terhadap ekosistem laut dan kehidupan pesisir
  - **Konsep Asuransi Lingkungan**
    - Pengertian dan fungsi asuransi lingkungan
    - Jenis produk asuransi untuk mitigasi pencemaran laut
  - **Penerapan Asuransi Lingkungan dalam Konteks Laut**
    - Studi kasus dan simulasi penerapan asuransi lingkungan untuk industri
    - Langkah-langkah pengajuan klaim asuransi
  - **Peran Masyarakat dan Pemerintah dalam Pengelolaan Pencemaran Laut**
    - Kebijakan yang perlu diterapkan
    - Kolaborasi antara sektor industri, pemerintah, dan masyarakat
-

---

### **Lampiran 3: Rencana Aksi dan Kebijakan**

#### **Rencana Aksi Pengurangan Pencemaran Laut di Wilayah Pesisir**

- 1. Peningkatan Pengawasan Terhadap Pembuangan Limbah**
    - Penguatan pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap pembuangan limbah industri ke laut.
    - Implementasi sanksi yang tegas bagi perusahaan yang melanggar.
  - 2. Pengembangan Program Asuransi Lingkungan**
    - Pengembangan program asuransi untuk industri yang berpotensi mencemari laut, seperti pabrik pengolahan limbah dan industri kimia.
    - Edukasi kepada masyarakat dan industri mengenai manfaat asuransi lingkungan.
  - 3. Penyuluhan dan Edukasi Berkelanjutan**
    - Pelaksanaan kegiatan penyuluhan secara berkala untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencemaran laut dan perlindungan lingkungan.
- 

### **Lampiran 4: Umpan Balik Peserta**

#### **Umpan Balik Umum**

Sebagian besar peserta menyatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat dan mereka merasa lebih siap untuk mengimplementasikan kebijakan lingkungan di daerah pesisir mereka. Banyak peserta yang menekankan pentingnya edukasi berkelanjutan tentang pengelolaan pencemaran laut.

#### **Komentar Peserta:**

"Workshop ini membuka mata kami tentang betapa pentingnya perlindungan laut. Kami berharap pemerintah daerah bisa segera menerapkan kebijakan yang sudah dirumuskan."

---

### **Lampiran 5: Laporan Hasil Evaluasi**

#### **Evaluasi Kegiatan Pengabdian**

##### **1. Peningkatan Pengetahuan**

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 85% peserta mengalami peningkatan pemahaman yang signifikan tentang konsep asuransi lingkungan dan cara penerapannya untuk mengatasi pencemaran laut.

##### **2. Keterlibatan Masyarakat**

70% peserta berkomitmen untuk mendukung penerapan kebijakan yang telah disarankan, seperti meningkatkan pengawasan terhadap pencemaran dan mendukung penerapan asuransi lingkungan.